

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112 Laman <u>www.diskominfo.kalteng.go.id</u>, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor 06/DIK/PPID-KT/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas:
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);
- 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 05/PK/PPID-KT/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECU**ALIKAN** PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 05/PK/PPID-KT/2025 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : P pada tanggal : 2

: Palangka Raya: 29 Agustus 2025

engelola Informasi dan Dokumentasi

RANGGA LESMANA, S.IP., M.M.

mantan Tengah.

Pembina

NIP. 19910322 201206 1 001

NOMOR 05/PK/PPID-KT/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Perti	mbangan Bagi Publik	
		Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
1.	Data pribadi perseorangan dan	 Undang-Undang Nomor 14 	Dapat mengungkap	Melindungi hak	- Sampai dengan
	kependudukan ASN Dinas Kebudayaan dan	Tahun 2008 Tentang	rahasia pribadi	pribadi seseorang	mendapat
	Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah:	Keterbukaan Informasi	seseorang		persetujuan yang
	1. Nomor Kartu Keluarga (KK);	Publik Pasal 17 huruf h			bersangkuta
	2. Nomor Induk Kependudukan (NIK);	,	- 2		- Sampai dengan U
	3. Jenis kelamin;	- Undang-Undang Nomor 24	6 4	2	yang berkaitan
	4. Tempat lahir;	Tahun 2013 Tentang	*		tidak berlaku
	5. Tanggal/bulan/tahun lahir;	Perubahan atas UU No. 23			
	6. Golongan darah;	Tahun 2006 Tentang	n 2 — n 2		
	7. Agama/kepercayaan;	Administrasi Kependudukan	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
	8. Status perkawinan;		- N		
	9. Status hubungan dalam keluarga;	 Undang-Undang Nomor 27 			
	10. Cacat fisik dan/atau mental;	Tahun 2022 Tentang	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	11. Pendidikan terakhir;	Perlindungan Data Pribadi			
	12. Jenis pekerjaan;		4.		
	13. NIK ibu kandung;	* - F		A REPORT OF THE RESERVE AND A SECOND OF THE RESERVE AND A	
	14. Nama ibu kandung;	u ·	h		
	15. NIK ayah;		, a , a		
	16. Nama ayah;				
	17. Alamat sebelumnya;				
	18. Alamat sekarang;	T T			
	19.Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal	7			
	lahir;			1 × × × ×	
	20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal		2		
	lahir;			1 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
	21.Kepemilikan akta perkawinan/buku	Eg a		, -a	
	nikah;				
	22. Nomor akta perkawinan/nomor buku		177E-1 621		
	nikah;				
	23. Tanggal perkawinan;				

	24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta cerai/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
2.	Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat (2) huruf f 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	 Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
3.	Nomor rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan Pasal 38 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	 Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
4.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	 Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
5.	Sistem operasi, manajemen dan keamanan website dan/atau aplikasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberikan keamanan informasi elektronik/dokumen	- Selama website dan aplikasi masih berlaku

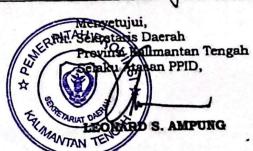
Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
ndak beriaku

Kalimantan Tengah	Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40A ayat (1) dan Pasal 7	elektronik badan publik	- Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
	Arra Carlos St. Marketing San St. are an arranged to the contract of the contr		the control of the co

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TID
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	2
2.	BINTARNO, S.H., M.H.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	CATH.
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Rins
5.	ERAWATY, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	amile
6.	YOSIAS, S.Hut., M.Si	Sekretaris	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	8
7.	THERESIA EVITA, S.T., M.T	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	think
8.	DANIEL LAMALEWA, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	Ser !
9.	CINTHANY SILVANA. H, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	92

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JI. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112 Laman <u>www.diskominfo.kalteng.go.id</u>, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor 08/DIK/PPID-KT/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);

7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi

dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 07/PK/PPID-KT/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 07/PK/PPID-KT/2025 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di

: Palangka Raya

pada tanggal

: 29 Agustus 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah,

RANGGA LESMANA, S.IP., M.M.

Pembina 1

NIP. 19910322 201206 1 001

NOMOR 07/PK/PPID-KT/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informaci	Dasar Hukum Pengecualian Konsekuens	si/Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
Informasi	Informasi Dibuka	a Ditutup	
Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah: 1. Nomor Kartu Keluarga (KK); 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/Kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK Ibu Kandung; 14. Nama Ibu Kandung; 15. NIK Ayah; 16. Nama Ayah; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor kelahiran/nomor surat kenal lahir;	erseorangan dan ASN Badan an Bencana dan akaran Provinsi migah: tu Keluarga (KK); uk Kependudukan (NIK); min; hir; ulan/tahun lahir; Darah; percayaan; kawinan; oungan dalam keluarga; dan/atau mental; n terakhir; rjaan; undung; Kandung; kandung; kandung; kandung; ma akta kelahiran/surat i; ahiran/nomor surat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	a Ditutup ungkap Melindungi hak	- Sampai dengan mendapat pesetujuan yang bersangkutan Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

	 22. Nomor akta perkawinan/nomor buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta cerai/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 				
2.	Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat (2) huruf f 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	 Sampai dengan mendapat pesetujuan yang bersangkutan. Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
3.	Nomor rekening, NPWP, KTP Penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan Pasal 38 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	 Sampai dengan mendapat pesetujuan yang bersangkutan. Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
4.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	 Sampai dengan mendapat pesetujuan yang bersangkutan. Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

		- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21			
5.	Sistem operasi, manajemen dan keamanan Website dan/atau aplikasi pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40A ayat (1) dan Pasal 7	rahasia badan	Memberikan keamanan informasi elektronik/dokume n elektronik badan publik	 Sampai dengan mendapat pesetujuan yang bersangkutan. Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	ттр
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, S.H., M.H.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	\$
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	alinger
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E.	Pengelola Layanan Kehumasan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Rius
5.	ERAWATY, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Enviro.
6.	NOOR ASWAD, S.Hut	Plt. Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	1 James
7.	ALPIUS PATANAN, S.Hut	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	A ,
8.	HELDAE, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	-187-
9.	ELBRIAN ERNEST, S.Kom	JFT Pranata Komputer	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	

10.	JONI WINARNO, S.Sos	JFT Pengadaan Barang Jasa	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	/ for
13.	YANUAR PURWANTO, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	ONS
14.	DEVIANA, ST	Penata Layanan Operasional	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	This.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,

LEONARD S. AMPUNG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112 Laman <u>www.diskominfo.kalteng.go.id</u>, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor 04/DIK/PPID-KT/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04/PK/PPID-KT/2024

yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya pada tanggal : 24 Oktober 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah,



NOMOR 04/PK/PPID-KT/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimb	oangan Bagi Publik	Touche Webs
iniormasi	Informasi	Dibuka Ditutup		Jangka Waktu
 Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah: Nomor KK; NIK; Jenis Kelamin; Tempat Lahir; Tanggal/bulan/tahun lahir; Golongan Darah; Agama/Kepercayaan; Status Perkawinan; Status hubungan dalam keluarga; Cacat Fisik dan/atau mental; Pendidikan terakhir; Jenis Pekerjaan; NIK Ibu kandung; Nama Ibu kandung; NiK Ayah kandung; Nama Ayah kandung; Nama tebelumnya; Alamat sekarang; Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;	 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	 Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 2. Kondisi keuangan, aset, pendapatan 	Undang-Undang Nomor 14	Dapat mengungkap	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan mendapat
dan rekening bank ASN Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	rahasia pribadi seseorang	seseorang	persetujuan yang bersangkutan
3. Nomor Rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan.	 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan 38 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
4. Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan ASN Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

	b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara			
5. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Dinas Perhubungan Prov. Kalteng		Badan Publik	Memberikan keamanan informasi Badan Publik	Selama Aplikasi dan Website masih berlaku
	b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	2
2.	BINTARNO, SH., MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	and.
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, SE	Pengelola Layanan Kehumasan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Rius

5.	ERAWATY, SE	Pengelola Gaji	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Emme
6.	JOKO TRI WAHYONO, SE	Kasubag Penyusunan Program	Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	Mr 304
7.	RINNI DEVIANA, A.Md,KA	Pelaksana	Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	Janis.
8.	M. RIDHA, A.Md T	Pelaksana	Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	8

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Atasan PPID,

MUHAMAD KATMA F. DIRUN

Pembina Utama Madya NTP 19661022 199308 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112 Laman <u>www.diskominfo.kalteng.go.id</u>, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor 03/DIK/PPID-KT/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas:
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2024 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di pada tanggal : Palangka Raya: 24 Oktober 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS SISWADI Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196802041999031007

NOMOR 03/PK/PPID-KT/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu dua puluh empat bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertir	nbangan Bagi Publik	Iongko Wolster
iniormasi	Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
 Data pribadi pelaku usaha : Nama Lengkap Pimpinan/Pemilik (kecuali Badan Usaha terbuka) NIK NPWP 	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e;	a. Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	a. Mencegah penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha	 Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; Sampai dengan
4. Alamat Rumah5. Telepon/HP Pribadi6. Alamat Email Pribadi	b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2.	b. Melanggar privasi pelaku usaha	b. Melindungi hak pribadi pelaku usaha	mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2. Rencana awal investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan e	Mengganggu kepentingan persaingan usaha yang sehat dan mengganggu ketahanan ekonomi nasional	Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak mengganggu praktik bisnis yang berlaku	Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi

3. Identitas pelapor pada layanan pengaduan di DPMPTSP Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	 Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
4. Memorandum/Nota Dinas, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalah gunakan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab	Mencegah penyalah gunaan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab	Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi
5. Data pribadi Pegawai ASN DPMPTSP Prov. Kalteng meliputi: 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf g dan h, Pasal 18 Ayat 2 huruf a dan b; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2 Huruf a s.d ee dan Pasal 79 Ayat 1; Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2) huruf b. 	Mengungkap data perseorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia; Ketaatan terhadap Undang-Undang.	 Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal Perkawinan/buku nikah; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian / surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.; 				
6. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN DPMPTSP Prov. Kalteng	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 	Mengungkap data pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
7. Data rekam medis ASN DPMPTSP Prov. Kalteng	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/ III/2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10).	Mengungkap data pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
8. Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan ASN DPMPTSP Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

9. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Peraturan Presiden Nomor 12	Mengganggu	Mencegah persaingan	Selama Undang-Undang
dan Rincian Penawaran Pengadaan	Tahun 2021 tentang Perubahan	kepentingan	usaha yang tidak	membatasi untuk
Barang/Jasa di DPMPTSP Prov. Kalteng	Atas Peraturan Presiden Nomor	persaingan usaha	sehat	dirahasiakan atau tidak
yang belum ditetapkan	16 Tahun 2018 tentang	yang sehat		diungkapkan kepada publik
	Pengadaan Barang/Jasa			
	Pemerintah Pasal 26 dan 38			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	/ TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	\$
2.	BINTARNO, SH., MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	and .
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, SE	Pengelola Layanan Kehumasan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Puils
5.	YETTY SUKMAWATI, S.Pd	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	11/0000
6.	NOPIANTI BASIRUN, S.Kom	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Herr
7.	ERAWATY, SE	Pengelola Gaji	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Erring
8.	ESTHER M.L TOBING, S.Hut, M.Si	Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	INSA!
9.	M. ALDHIETYA. A, S.STP, M.I.P	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	THE ALL

10.	SAIFUL ANWAR, SE, M.A.P	Kasubag Keuangan dan Aset	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	And
11.	ALBERTUS ARNOLD, SE	Pelaksana	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	N. C.
12.	DEBBY SELVYANTI, ST., M.T	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	Gaeston
13.	ENNY MILIDA, A.Md	Pengelola Layanan Publik dan Hubungan Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	Minimus
14.	VUJI ERVINA, S.STP., M.I.P	JFT PKPM Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	Mahry

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Plt. Sekretaris Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Atasan PPID,

MUHAMAD KATMA F. DIRUN Pembina Utama Madya NIP. 19661022 199308 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112 Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el: diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor: 01/DIK/PPID-KT/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KESATU

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2024 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

> Ditetapkan di : Palangka Raya pada tanggal : 3 Juni 2024

Provinci Kalimantan Tengah,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

AGUS SISWADI

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680204 199903 1 007

NOMOR 01/PK/PPID-KT/2024

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Aula Kanderang Tingang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Ar Hukum Pengecualian Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
1. Data Pegawai ASN		Dibuka	Ditutup	Jangka waktu
Setda Prov. Kalteng meliputi: a. Data Pribadi b. Data Mutasi c. Data Promosi d. Data Pensiun e. Data Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Dalam Jabatan Tertentu f. Data Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin g. Data Proses Izin Perceraian	 a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 58 Ayat (2), Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1)): b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan j. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3). 	perseorangan yang bersifat rahasia.	Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia pribadi.	1.Jika Undang-Undan yang berkaitan tida berlaku lagi; 2.Sampai denga mendapat persetujua tertulis dari yan bersangkutan, berkaitan dengan posis seseorang dalan jabatan publik.
2. Hasil Evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan ASN lingkup Setda Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapa persetujuan yang bersangkutan

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertir	mbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Websie dan Aplikasi	 a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b); b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 	Rahasia Badan Publik	Ditutup Memberi Keamanan terhadap Informasi yang Bersifat Rahasia	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	\$
2.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Anst
3.	ROULI NOVIA V. SIMANJUNTAK, SE	Pelaksana	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Ruius
4.	DEWI YULIYANTI	Prahum Ahli Muda	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	Asmit
5.	RANI DIAH	Prahum Ahli Muda	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	The state of the s

6.	IDA YANTI	Arsiparis	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	Quil '
7.	HERJUNO DAMAR H	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	M.
Demik	sian Pengujian Konsekuensi ini dib	ouat secara seksama dan penuh ketelitian.		0 }

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Belaku Arasan PPID,

0 199103 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112 Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el: diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor 02/DIK/PPID-KT/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2024 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya pada tanggal : 3 Juni 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah,

AGUS SISWADI

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680204 199903 1 007

NOMOR 02/PK/PPID-KT/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertin		
	Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
1. Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah: 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/ buku nikah; 23. Tanggal Perkawinan / buku nikah; 24. Kepemilikan akta perceraian;	a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2 Huruf a s.d ee dan Pasal 79 Ayat 1; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf g dan h, Pasal 18 Ayat 2 huruf a dan b; c. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b.	Mengungkap perseorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia; Ketaatan terhadap Undang-Undang.	 Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

 25. Nomor akta perceraian / surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 				
Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN	 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 	Mengungkap data pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai dengan mendapt persetujuan tertulis dai yang bersangkutas berkaitan dengan posii seseorang dalam jabatas publik
3. Data rekam medis ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III /2008 Tentang rekam Medis (Pasal 10).	Mengungkap data pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dai yang bersangkutan, berkaitan dengan possi seseorang dalam jabatan publik

4. Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan ASN Satpol PP Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.		Melindungi data pribadi bersifat rahasia	1 O
5. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Satpol PP Prov. Kalteng	 a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b); b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 	Dapat Mengungkap Rahasia Badan Publik	Memberi Keamanan terhadap Informasi yang Bersifat Rahasia	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;
6. Rencana jadwal dan tempat Kegiatan Penegakan PERDA dan PERKADA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a (1);	Pelaksanaan penegakan PERDA dan PERKADA tidak terlaksana dengan optimal	Melindungi kepentingan Masyarakat.	Terbatas sampai Penegakan PERDA dan PERKADA terlaksana

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	/TVDPS	
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	TTD	
2.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	and h	
3.	ROULI NOVIA VINOLIA .S, SE	Pelaksana	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Rivis	
4.	HARI WIBOWO THOMAS	Ketua PPID Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng		
5.	LUGIKAETER	Sekretaris PPID Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	Har	
6.	DEDI SETIADI	Pol PP Ahli Madya	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	My	
7.	TITIEK MARYANI	Pol PP Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	- the	
8.	INGE MAWARNY	Pol PP Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng		A 2	
9.	SYLVIA .A	Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	April	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah RULTAKU AMSAN PPID,

NURYAKIN, M.Si

50610 199103 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km.3,5 No. 18 A Palangka Raya 73112

Website: www.diskominfo.kalteng.go.id E-mail: diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor 08/SK-DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 06/PK/PPID-KT/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 06/PK/PPID-KT/2022

yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya pada tanggal : 28 Oktober 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah,



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 06/PK/PPID-KT/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pro Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengeng Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertim	bangan Bagi Publik	Tomeleo Wolster
Informasi	Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2	Undang	 Ketaatan terhadap Undang- Undang Upaya perlindungan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak 	
	2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bab IV		berhadapan dengan hukum	
	Pasal 41 Ayat (1) huruf a 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) huruf i			
	4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun			
	2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab IV Pasal 10 huruf c 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun			
	2002 tentang Perlindungan			

	Anak Pasal 64 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf b 6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf i			
Data Perseorangan ASN meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai;	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (2) huruf a s.d ee. 3. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b	Pelanggaran terhadap Undang- Undang	Ketaatan terhadap Undang- Undang Upaya perlindungan data perseorangan ASN	Tidak terbatas

aa. tanggal perceraian;		
bb. sidik jari;		
cc. iris mata;		
dd. tanda tangan; dan		
ee. elemen data lainnya yang		
merupakan aib seseorang.		

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	MASKUR, SH, MH	Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	BINTARNO, SH, MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
4.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	\$
5.	ROULI NOVIA. V.S	Pelaksana	Diskominfosantik Prov. Kalteng	Fries
6.	ELINTINA	Pelaksana	Diskominfosantik Prov. Kalteng	413
7.	dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes	Kepala Dinas	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	The state of the s
8.	MARWATI SUKWATINI	Sekretaris Dinas	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	A my

9.	MURJANI	Kepala Bidang Data dan Informasi	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	A.F.
10.	RENSI	Kepala Seksi TL UPT PPA	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	Ann
11.	HERO WALPATERA	Pranata Komputer	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	Ages

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sclaku Atasan PPID,

Drs. H. Muly AKIN, M.Si Pembina Utuma Madya NIP. 19650610 199103 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km.3,5 No. 18 A Palangka Raya 73112

Website: www.diskominfo.kalteng.go.id E-mail: diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor 09/DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 07/PK/PPID-KT/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 07/PK/PPID-KT/2022

yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya pada tanggal : 28 Oktober 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah,



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 07/PK/PPID-KT/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/l	Pertimbangan Bagi Publik	Iongko Wolstu
iniormasi	Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
Data perseorangan meliputi:	a. Undang-undang Nomor 24	Mengungkap da	ta a. Melindungi data	1. Jika Undang-Undang
a. nomor KK;	Tahun 2013 tentang	perseorangan yar	ng perseorangan yang	yang berkaitan tidak
b. NIK;	Perubahan Atas Undang-	bersifat rahasia	bersifat rahasia;	berlaku lagi;
c. nama lengkap;	undang Nomor 23 Tahun		b. Ketaatan terhadap	Sampai dengan
d. jenis kelamin;	2006 Tentang Administrasi		Undang-Undang.	mendapat persetujuan
e. tempat lahir;	Kependudukan Pasal 58			tertulis dari yang
f. tanggal/bulan/tahun lahir;	Ayat 2 Huruf a s.d ee dan			bersangkutan, berkaitan
g. golongan darah;	Pasal 79 Ayat 1;			dengan posisi seseorang
h. agama/kepercayaan;	b. Undang-undang Nomor 14			dalam jabatan publik.
i. status perkawinan;	Tahun 2008 tentang			
j. status hubungan dalam keluarga;	Keterbukaan Informasi			
k. cacat fisik dan/atau mental;	Publik Pasal 17 Huruf g dan			
 pendidikan terakhir; 	h, Pasal 18 Ayat 2 huruf a			
m. jenis pekerjaan;	dan b;			
n. NIK ibu kandung;	c. Permen Kominfo No. 20			
o. nama ibu kandung;	Tahun 2016 tentang			
p. NIK ayah;	Perlindungan Data Pribadi			
q. nama ayah;	Dalam Sistem Elektronik			
r. alamat sebelumnya;	Pasal 2 ayat (2) huruf b.			
s. alamat sekarang;				
t. kepemilikan akta kelahiran/surat				
kenal lahir;				
u. nomor akta kelahiran/nomor surat				
kenal lahir;				
v. kepemilikan akta perkawinan/buku				
nikah;				

w. nomor akta perkawinan/buku nikah;				
x. tanggal perkawinan;				
y. kepemilikan akta perceraian;				
z. nomor akta perceraian/surat cerai;				
aa. tanggal perceraian;				
bb. sidik jari;				
cc. iris mata;				
dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang				
merupakan aib seseorang.				
merupakan arb sescorang.				
Dokumen Kependudukan Meliputi :	a. Undang-undang Nomor 24	Mengungkap	a. Melindungi Dokumen	1. Jika Undang-Undang
a. Biodata Penduduk;	Tahun 2013 tentang	Dokumen	Kependudukan yang	yang berkaitan tidak
b. KK;	Perubahan Atas Undang-	Kependudukan	bersifat rahasia;	berlaku lagi;
c. KTP;	undang Nomor 23 Tahun		b. Ketaatan terhadap	
d. surat keterangan kependudukan;	2006 Tentang Administrasi		Undang-Undang.	mendapat persetujuan
dan	Kependudukan, Pasal 59			tertulis dari yang
e. Akta Pencatatan Sipil.	dan Pasal 79 Ayat 1;			bersangkutan, berkaitan
	b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang			dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
	Keterbukaan Informasi			dalam jabatan publik.
	Publik Pasal 17 Huruf g dan			
	h, Pasal 18 Ayat 2 huruf a			
	dan b;			
	c. Permen Kominfo No. 20			
	Tahun 2016 tentang			
	Perlindungan Data Pribadi			
	Dalam Sistem Elektronik			
Data Dandanatan ACN	Pasal 2 ayat (2) huruf b.	Manager alam and a sin	Mambari Ironman	1. Jika Undang-Undang
Data Pendapatan ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	yang berkaitan tidak
	Keterbukaan Informasi Publik	pribadi seseorang	informasi pribadi seseorang	berlaku lagi;
	Pasal 17 huruf h angka 3;			2. Sampai dengan
	- The second of the second of			mendapat persetujuan
				tertulis dari yang
				bersangkutan, berkaitan
				dengan posisi seseorang
				dalam jabatan publik.

Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi	a. Undang-Undang Nomor 14 I Tahun 2008 tentang r Keterbukaan Informasi		Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;
	Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30.		

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TrD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	2
2.	BINTARNO, S.H.,M.H.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	2
4.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	april .
5.	ROSALIA K.B.A, S.STP., M.A.P.	Sekretaris Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	Bil Dur
6.	Drs. SYARIF HIDAYAT	Kepala Bidang FPAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	P

7.	NIMROD, S.P., M.Si.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng
8.	FRANKY NOVELIANDI, S.IP., M.A.P.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng
9.	M. DAVA JUSTISIA, S.TrIP.	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Selatu Masan PPID,

Drs. H. NURAKIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19650610 199103 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Tjilik Riwut Km.3,5 No.18A Palangka Raya 73111

Website: www.diskominfo.kalteng.go.id E-mail: diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor 04/SK-DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43
 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
 Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMPERHATIKAN

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-

KT/2022.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH.

KESATU

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya pada tanggal : 27 Juni 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah,



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 02/PK/PPID-KT/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertin	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		
111101111031	Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu	
Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah: 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h		Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan	

		togo to to the control of the contro		
 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan 30. Elemen data lainnnya yang merupakan aib seseorang 				
Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Nomor rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	-	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	2 0 0 1	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30		Memberikan keamanan informasi Badan Publik	Selama Aplikasi dan Website masih berlaku

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	ATTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH,M.H	Plt. Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	2
4.	BILLY BARETO, ST	Kepala Bidang Persandian	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	hoorts
5.	LAURA ANDALINA, SP, M.Si	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Aufb.

pr				P
6.	YULIANI, S.H, M.AP	Sekretaris	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	T Jun
7.	ZUR RAWDOH, S.Pi	Kabid Kelautan dan Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Rau
8.	KRISTINA DJOJOATMODJO, S.PI, M.Si	Analis Data dan Informasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	a Como
9.	TRI SUMARYATI, S. Kom	Pranata Komputer	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Fign
10.	LENIWAN OKTORINA S, S.Pi	Penyusun Laporan Keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	Hour.
11.	ROSALIA	Sekretaris	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km.3,5 No.18A Palangka Raya 73111

Website: www.diskominfo.kalteng.go.id E-mail: diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Nomor 05/DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMPERHATIKAN : L

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PPID-KT/2022

Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2022

yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya pada tanggal : 27 Juni 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS SISWADI Pembina Tingkat I NIP. 196802041999031007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 03/PK/PPID-KT/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertir	Jangka	
	Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup	Waktu
Rincian data ASN Pemprov Kalteng mencakup: a.Data Pribadi b.Data Mutasi c.Data Promosi d.Data Pensiun e.Data Pengangkatan dan/atau Pemberhentian dalam Jabatan tertentu f.Data Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin g.Data Proses Ijin Perceraian	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)		Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Hasil Evaluasi berkaitan dengan Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi kemampuan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Identitas pelapor Pengaduan Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	λ
2.	BINTARNO, SH,M.H	Plt. Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	\$
4.	LAURA ANDALINA, SP, M.Si	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	andr.
5.	FERAWATI, S.SOS, M. Med.Kom	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	2 Purk
6.	ADE TERESIA TIMBUNG, S. Sos, M. AP	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	Harrist
7.	M. AGUS PRIANTO, SH, MA	Analis Kebijakan Muda	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	
8.	RUSTANTINI, S. Sos	Analis Kepegawaian Muda	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	Ping

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah Selaku Atasan PPID,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. H. NURYAKIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 196506101991031025